

Seri Bunga Rampai Kontribusi Pendidikan Ilmu Sosial dalam Membangun Keindonesiaan

Oleh: Hispisi
(Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia)

Editor:
Ari Wahyudi
Oksiana Jatningsih



Penerbit
Unesa University Press

Seri Bunga Rampai

Kontribusi Pendidikan Ilmu Sosial dalam Membangun Keindonesiaan

Oleh: Hispisi

(Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia)

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : unipress@unesa.ac.id

unipressunesa@yahoo.com

vii, 231 hal., Illus, 15,5 x 23

ISBN: 978-602-449-418-6

copyright © 2020 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Ketua Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI)

Ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Di satu sisi, ilmu harus ditransfer kepada generasi berikutnya melalui pendidikan, agar mereka mampu menjelaskan berbagai fenomena yang ada. Ilmu sosial akan memberikan narasi yang menjelaskan hubungan kausalitas dari berbagai fenomena yang ada melalui teori-teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Dengan berbekal ilmu, khususnya ilmu sosial, seseorang diharapkan mampu menjelaskan realitas sosial dan sekaligus mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Di sisi lain, pendidikan juga menjadi sarana untuk membantu seseorang mengembangkan dan sekaligus melakukan perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku. Dengan bahan ilmu sosial, Pendidikan ilmu sosial diharapkan mampu merubah seseorang menjadi semakin bijak dalam bersikap dan bertindak.

Dalam konteks ini, kerjasama antara ilmu sosial dan pendidikan ilmu sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Ilmu sosial akan terus mensuplai bahan yang dibutuhkan oleh pendidikan ilmu sosial, dan sekaligus menginformasikan perkembangan teori sebagai hasil abstraksi dan refleksi atas realitas sosial. Sedangkan pendidikan ilmu sosial yang membentuk karakter seseorang melalui suatu proses pemahaman dan penyadaran atas apa akibat yang terjadi jika suatu sikap dan tindakan dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan ilmu sosial diharapkan mampu memahami dan menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur, dengan sumber daya alam yang kaya dan melimpah sebagai modal kemajuan. Meskipun demikian, jika karakter bangsa ini tidak baik, modal tersebut bisa menjadi sumber kehancuran. Perilaku korup yang dilakukan oleh para elit bisa menjadi

penghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Ketidakhahaman dan ketidaksadaran rakyat atas sistem demokrasi ternyata bisa menjadi penyebab perilaku korupsi.

Sebagai bangsa yang majemuk dengan multikulturalnya, diperlukan sikap toleran dan menempatkan kesederajatan dalam perbedaan. Jika sikap tersebut tidak dimiliki, kemajemukan dan multikultur akan menjadi sumber konflik sosial maupun politik. Di sisi lain, kekayaan alam yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik juga akan menjadi bumerang bagi penghuninya. Eksploitasi yang berlebihan terhadap alam, akan menyebabkan alam menjadi semakin “garang” terhadap kita. Diperlukan kearifan dalam mengelola lingkungan, sehingga kelestarian fungsinya dalam mendukung kehidupan bisa terus terpelihara dan terjaga. Oleh karena itu, pendidikan ilmu sosial menjadi hal yang perlu digandeng dalam pembangunan bangsa, untuk membangun karakter wisdom.

Buku ini hadir sebagai bagian dari kepedulian para ilmuwan sosial dan para pendidik ilmu sosial atas kondisi bangsa. Buku ini menyadarkan bahwa masih banyak masalah sosial yang harus ditangani, agar pembangunan bangsa tidak terhambat oleh berbagai konflik sosial dan karakter buruk. Pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik, memang diperlukan, tetapi jika sampai terjadi konflik sosial, semua akan rusak dan sia-sia. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat bagi pembacanya.

Terima kasih.

Surabaya; Januari 2020

Ketua Hispisi

Ttd

Prof. Dr. Warsono, M.S.

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Pancir	ii
Kata Pengantar Ketua HISPISI	iii
Daftar Isi	v

Bagian 1.

MEMBANGUN INDONESIA DI INDONESIA, DINAMIKA KONTESTATIF DARI <i>NATION</i> KE <i>NATION STATE</i> – <i>Musta'in Mashud</i> – <i>Dosen Departemen Sosiologi Unair</i>	(1-27)
--	---------------

Bagian 2.

PENANAMAN NILAI KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MELALUI MODEL <i>ECO-EDUTAINMENT</i> DALAM PEMBELAJARAN IPS DI SMP KOTA SEMARANG - <i>Apik Budi Santoso; Dewi Liesnoor Setyowati; Wasino</i> - <i>Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNNES.</i>	(28-46)
--	----------------

Bagian 3.

HAMBATAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN JURNAL ILMIAH: Pengalaman di Fakultas Ilmu Sosial UNNES - <i>Tsabit Azinar Ahmad</i> - <i>Jurusan Sejarah.</i>	(47-55)
---	----------------

Bagian 4.

PEMETAAN KETERSERAPAN ALUMNI JURUSAN GEOGRAFI FIS UNNES DI DUNIA INDUSTRI MELALUI METODE <i>TRACER STUDY</i>- <i>Tjaturahono Budi Sanjoto¹, Saptono Putro¹, Juha¹</i> <i>Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.</i>	(56-68)
--	----------------

Bagian 5.

**IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI MELALUI
PENDIDIKAN IPS DALAM MEMPERKUAT JATI
DIRI BANGSA - Ricu Sidiq, Flores Tanjung, Najuah - Dosen
Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosia, Universitas Negeri
Medan.**

(69-78)

Bagian 6.

**URGENSI MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
DALAM KEBUTUHAN PENGUATAN JATIDIRI
BANGSA - Apeles L. Lonto dan Wenly R.J. Lolong - Dosen
Jurusan PPKn FIS Unima.**

(79-93)

Bagian 7.

**PENGEMBANGAN MATERI STUDI MASYARAKAT
INDONESIA YANG BERWAWASAN KEINDONESIAN
– Lukitaningsih - Department of History Education, Universitas
Negeri Medan.**

(94-111)

Bagian 8.

**MEMPERKUAT IDENTITAS KE INDONESIAAN
MELALUI PEMBELAJARAN ANTROPOLOGI
DALAM KURIKULUM IPS – Rosramadhana - Dosen Prodi
Pendidikan Antropologi FIS Unimed**

(112-121)

Bagian 9.

**PERAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA –Warsono - Guru Besar Prodi
PPKn FISH Unesa**

(122-137)

Bagian 10.

**MERAJUT KE-INDONESIAAN: MENYELAMI
PIKIRAN *FOUNDING FATHERS* ASAL
MINANGKABAU TENTANG INTEGRASI BANGSA -
Siti Fatimah, Uun Lionar - Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Padang.**

(138-163)

Bagian 11.

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI AKAR MASALAH
DAN SOLUSI – Warsono - Dosen PMPKn FISH Universitas
Negeri Surabaya.**

(164-179)

Bagian 12.

**ISLAMIC HISTORY DALAM KONTEKS SOSIO-
KULTURAL INDONESIA - Muhammad Turhan Yani -
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri
Surabaya.**

(180-186)

Bagian 13.

**INDIGENISASI ILMU-ILMU SOSIAL DI INDONESIA:
LANGKAH YANG MASIH TERSEOK - Ajat Sudrajat –
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta**

(187-208)

Bagian 14.

**FILSAFAT ILMU SOSIAL INDONESIA: ARTI
PENTING, KARAKTERISTIK DAN PROSPEK
PENGEMBANGANNYA - Heri Santoso – Dosen Filsafat
Ilmu Sosial – Universitas Gadjah Mada**

(209-222)

Bagian 15.

**PENDIDIKAN GEOGRAFI DAN TANTANGAN ABAD 21
Dr. Muhammad Zid, M.Si dan Fauzi Ramadhoan AR, S.Pd. MA –
Universitas Negeri Jakarta**

(223-230)

Catatan Akhir

231

MERAJUT KE-INDONESIAAN: MENYELAMI PIKIRAN *FOUNDING FATHERS* ASAL MINANGKABAU TENTANG INTEGRASI BANGSA

Siti Fatimah, Uun Lionar

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
sitifatimah@fis.unp.ac.id/ uunlionar@fis.unp.ac.id

A. Pendahuluan

Wacana mengenai integrasi selalu menjadi topik penting ketika membedah eksistensi Bangsa Indonesia, terutama dalam ruang sejarah pasca kemerdekaan di tahun 1945. Sepertinya sulit untuk mengatakan Indonesia yang belum berumur satu abad akan terbebas dari ancaman disintegrasi, mengingat catatan sejarah telah membuktikan bahwa dalam setiap periode kepemimpinan politik, ancaman disintegrasi selalu muncul dengan isu-isu beragam yang terkemas dalam identitas yang kental. Ancaman disintegrasi tersebut datang dari berbagai penjuru dengan kompleksitas masalah yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional (Bertrand, 2012).

Arus utama pada tingkat lokal pasca reformasi adalah semakin menguatnya etnosektisme yang dibarengi dengan konflik-konflik horizontal. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan reaksi atas praktik sentralisasi yang dilakukan selama periode orde baru. Kungkungan orde baru yang sentralistik tersebut telah menempatkan satu kebudayaan sebagai “ruh” kebudayaan utama yang termanifestasikan melalui praktik budaya Jawa. Kehadiran otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengembangkan potensi lokal telah menempatkan daerah sebagai titik utama pembangunan nasional. Namun, praktik otonomi daerah yang diharapkan memberi

keleluasan kepada daerah tidak semulus yang dibayangkan, ekspresi kebablasan dalam menyambut otonomi daerah telah menimbulkan distorsi bahkan ancaman disintegrasi, setidaknya pada bidang politik dan kebudayaan (Kacung Marijan, 2019; Latif, 2017).

Pada bidang politik, geliat demokrasi melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) telah menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, bahkan Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat beberapa daerah rawan konflik pada pilkada tahun 2018, diantaranya Papua, Mimika, Paniai, Jayawijaya, Puncak, Timor Tengah Selatan, Maluku, Konawe, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat (Hidayat, 2018). Selain itu, kehadiran “raja-raja kecil” sebagai pemenang kontestasi politik lokal telah menempatkan mereka sebagai penguasa dominan yang mengendalikan daerah (Sultan Hamengku Buwono X, 2008). Namun, kemenangan tersebut terkadang tidak diimbangi dengan pemahaman utuh mengenai tata kelola daerah, sehingga tidak sedikit ditemukan masalah yang muncul. Cakrawala yang sempit demikian, amat rentan menimbulkan sikap egoisme kelompok, eksklusivisme teritorial, hingga primordialisme.

Pada bidang kebudayaan, suatu yang begitu kentara pasca reformasi adalah ekspresi pencarian identitas lokal, upaya ini dilakukan melalui eksplorasi mencari keunggulan lokal pada daerah-daerah yang baru berdiri atau mekar (Zuhdi, 2017). Namun, kendati usaha tersebut tercapai dengan identitas yang unik, terkadang ekspresi publik sering terjebak pada pengkultusan yang bersifat etnosentris dengan anggapan bahwa identitas lain tidak lebih baik, atau malah “mengunggulkan” identitas sendiri di tengah etnisitas yang beragam.

Ancaman disintegrasi tidak hanya terjadi pada tingkat lokal yang mengedepankan semangat kedaerahan, namun juga pada tingkat nasional yang terakumulasi melalui ekspresi yang beragam. Ancaman disintegrasi memunculkan kompleksitas masalah yang berhubungan dengan isu kebudayaan, politik, sosial, dan agama. Isu kebudayaan yang masih “menganga” berkaitan dengan kecurigaan antar etnis,

kecurigaan tersebut berkaitan dengan pemberian label negatif oleh suatu etnis atas etnis lain, label tersebut bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga mengakar dalam sejarah (Suryohadiprojo, 2001). Masyarakat Sunda di Jawa Barat masih menempatkan kecurigaan pada etnis Jawa yang dianggap sebagai “pengkhianat”, begitupun sebaliknya. Hal demikian adalah pewarisan sejarah akibat Perang Bubat di masa Kerajaan Majapahit. Beberapa tahun belakang usaha mengadakan rekonsiliasi gencar dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu usaha konkret adalah menyelenggarakan dialog kebudayaan masyarakat Sunda dan Jawa. Selain itu sebagai simbol perdamaian maka nama Majapahit dijadikan sebagai nama salah satu jalan di Kota Bandung, sedangkan nama Padjajaran dijadikan nama salah satu jalan di Kota Surabaya dan Yogyakarta (merdeka.com, 2017).

Pada ranah politik, konstelasi yang terbangun beberapa tahun ini menunjukkan geliat politik identitas (*identity politics*) yang terlalu dominan bahkan berlebihan, hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan periode awal kemerdekaan Indonesia (Latif, 2017). Pada periode awal semangat politik tertuju pada pilihan-pilihan politik ideologi yang mengedepankan gagasan dan pemikiran. Kehadiran politik ideologi tersebut dibarengi dengan semangat ketokohan yang otentik dari penggerak partai kala itu, seperti Sutan Syahrir yang konsisten dengan garis sosialisme melalui PSI (Partai Sosialis Indonesia), Mohammad Natsir yang konsisten dengan semangat ke-Islam-an Masyumi, dan Soekarno dengan semangat nasionalis telah menggerakkan eksistensi PNI (Partai Nasional Indonesia). Kenyataan pada saat ini adalah orientasi politik mengalami sebuah reduksi substantif yang ditandai dengan perubahan orientasi tokoh politik, dari politik gagasan menjadi politik identitas. Kehadiran politik identitas yang mengedepankan simbol agama dan budaya sedikit banyak telah membuat ruang publik menjadi gaduh, akibatnya semakin menguatnya egosentris di dalam kelompok masyarakat hingga memunculkan rasa saling curiga atas perbedaan yang sengaja diciptakan.

Pada ranah sosial, ketimpangan pembangunan telah memunculkan banyak protes. Rasa ketidakadilan masih melekat pada sebagian masyarakat daerah, terutama di Indonesia bagian timur. Ketersediaan sarana pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai menjadi sorotan utama di samping kesejahteraan masyarakat. Pulau Papua yang kaya akan emas seperti kata Koes Plus, salah satu band legendaris Indonesia di tahun 90an “kolam susu”, pada kenyataannya tidak menempatkan masyarakat Papua hidup dalam keadaan sejahtera. Tidak dapat dipungkiri, peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa tahun belakangan ini, terakhir di Wamena, adalah bentuk ekspresi masyarakat lokal merespon pembangunan yang belum merata tersebut (Ikrar Nusa Bhakti & Natalius Pigay, 2019).

Dari uraian di atas, pada dasarnya Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak bersatu. Kompleksitas masalah “dari hulu hingga hilir” yang dibarengi dengan keberagaman suku, etnis, dan ras menjadi pendorong utama dan alasan bagi terjadinya disintegrasi. Namun, realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa di atas kompleksitas masalah dan perbedaan tersebut ternyata kepulauan-kepulauan bekas jajahan Belanda yang berbeda suku, etnis, dan ras tersebut dapat dan masih bersatu menjadi sebuah bangsa besar. Sulit untuk dipungkiri, sesungguhnya akar persatuan telah terbangun melalui sejarah yang panjang, silang budaya yang terjadi sejak periode Hindu-Budha, Islam, hingga pengaruh barat telah membentuk identitas bangsa Indonesia (Lombard, 2018). Pencarian identitas yang khas tersebut kemudian dilakukan oleh *founding fathers* melalui eksplorasi yang menyelami ruang historis Kepulauan Nusantara. Bangunan renungan menjadi dasar nilai kebangsaan dengan identitas yang satu di atas keberagaman (*unity in diversity*).

Walau berasal dari berbagai daerah, *founding fathers* bangsa telah menunjukkan sikap kebangsaan, melebur menjadi satu identitas yang termanifestasikan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 “berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung bahasa persatu, Indonesia”. Semangat tersebut kemudian dilanjutkan melalui

perumusan dasar negara Indonesia, Pancasila. Menariknya, kesepakatan-kesepakatan yang terbangun merupakan hasil dialektika adu gagasan antar tokoh yang mewakili banyak kelompok dan golongan. Dengan pikiran yang terbuka telah mengantarkan mereka menemukan titik temu atas pencarian identitas tersebut, hingga pada akhirnya menjadi kesepakatan bersama sebagai konsep dalam mendirikan republik yang bernama Indonesia.

Di antara *founding fathers* bangsa adalah mereka yang berasal dari Minangkabau, seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Sutan Syahrir, dan Tan Malaka. Keikutsertaan mereka dalam merumuskan konsep kebangsaan telah melampaui batas kultural Minangkabau. Di tengah ancaman disintegrasi, sudah selayaknya memetik kearifan dari *founding fathers* asal Minangkabau mengenai integrasi bangsa.

B. Ancaman Disintegrasi dalam Sejarah Indonesia

Sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah terbebas dari ancaman perpecahan. Politik pecah belah (*divide et impera*) yang dilakukan oleh Belanda dengan mendirikan negara boneka pada periode revolusi pisik, merupakan upaya untuk melemahkan eksistensi Republik yang baru berdiri tersebut (Kahin, 2013). Namun, upaya tersebut kandas ketika seluruh komponen bangsa berekonsiliasi dan menyepakati perlunya persatuan. Maka sejak tahun 1950 secara *de facto* dan *de jure* Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berdaulat.

Setelah berjuang menghadapi musuh dari luar, pada periode kemerdekaan bangsa Indonesia harus berhadapan dengan ancaman yang muncul dari dalam. Ancaman disintegrasi hadir dengan beragam faktor yang dilandasi dengan semangat ideologi dan identitas kedaerahan yang kental.

1. Gerakan Separatisme

Gerakan separatisme atau gerakan memisahkan diri yang dilakukan sebuah komunitas dari sebuah bangsa merupakan gejala universal yang sudah cukup lama berkembang, terkhusus di Asia Tenggara, hal ini berkembang pasca Perang Dunia II (Cipto, 2003; Sobandi, 2016). Tajamnya perbedaan etnis, bahasa, agama, dan budaya di banyak negara di Asia menjadi faktor utama munculnya gerakan ini.

Dalam sejarah Indonesia, gerakan separatisme telah terjadi di banyak tempat melewati spektrum waktu yang melintasi rezim kepemimpinan, sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin (orde lama), orde baru, hingga era reformasi. Pada periode awal kemerdekaan, gerakan separatisme muncul yang dilandasi atas perbedaan ideologi dan kepentingan. Gerakan tersebut diantaranya adalah Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun, Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo, Gerakan 30S/PKI, PRRI dan Permesta, GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Rakyat Maluku Selatan).

Pemberontakan PKI di Madiun merupakan aksi separatistis pertama pasca kemerdekaan. Pada tanggal 18 September 1948, Musso yang baru kembali dari Moskow memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Soviet Indonesia. Tujuannya adalah menggelorakan "Sebuah Jalan Baru untuk Republik Indonesia" dengan menjadi negara komunis (Cribb & Kahin, 2012). Gerakan ini didukung oleh Amir Syarifuddin yang ketika itu diberhentikan sebagai perdana menteri akibat kegagalan dalam Perundingan Renville (8 Desember 1947 – 17 Januari 1948), perundingan ini dipandang sangat merugikan Indonesia. Amir Syarifuddin membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang beranggotakan kaum tani dan buruh. Basis gerilya PKI adalah Madiun, namun Gerakan tersebut segera dapat ditumpas oleh Devisi Siliwangi melalui instruksi Jenderal Sudirman kepada Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur. Dalam pelarian, Muso akhirnya tewas pada tanggal 31 Oktober 1948, sementara beberapa tokoh lainnya melarikan diri ke luar negeri (Nugraha & Winarti, 2018).

Kegagalan Perundingan Renville (1948) yang mengharuskan hijrahnya pasukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta telah menimbulkan banyak gejolak. S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat beserta para pendukungnya pada tanggal 7 Agustus 1949 memproklamkan berdirinya NII (Negara Islam Indonesia). Tentara dan pendukungnya disebut TII (Tentara Islam Indonesia). Gerakan tersebut kemudian disambut oleh Daud Beureueh di Aceh, Amir Fatah dan Kyai Somolangu di Jawa Tengah, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan (Ricklefs, 2008). Pada tahun 1962 gerakan tersebut mulai redup dan dapat ditumpas ketika pemimpinnya S.M. Kartosuwiryo terbunuh.

Setelah beberapa tahun redup akibat kegagalan di Madiun, eksistensi PKI kembali bersinar ketika menjadi salah satu pemenang pada Pemilihan Umum tahun 1955 (Suwarno, 2012). Doktrin Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang dikembangkan oleh Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruhnya. PKI menjadi salah satu kekuatan penting pada masa demokrasi terpimpin, bersama Soekarno dan Angkatan Darat. Pada tahun 1965 melalui isu "Dewan Jenderal", PKI kembali melakukan aksi dengan menculik dan membunuh beberapa petinggi AD (Angkatan Darat) (Ahmad, 2016). Peristiwa tersebut dikenang sebagai peristiwa kelam sekaligus kontroversial dalam sejarah Indonesia.

Dalam kepemimpinan Demokrasi Terpimpin, Soekarno selalu mengedepankan jargon "revolusi" yang lebih konsen pada politik, hal ini telah mengakibatkan pembangunan daerah menjadi terabaikan. Merespon hal tersebut beberapa petinggi Angkatan Darat di daerah seperti Letkol Ahmad Husein di Sumatera Barat, Kolonel Maludin Simbolon di Sumatera Utara, Letkol R. Barlian di Sumatra Selatan, dan Letkol Ventje Sumual di Sulawesi Utara mengajukan tuntutan agar pemerintah pusat memperhatikan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah (Syamdani, 2009). Protes ini kemudian membesar menjadi sebuah gerakan perlawanan, Letkol Ahmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang memproklamasikan berdirinya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Gerakan tersebut

disambut oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan memproklamkan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada tanggal 17 Februari 1958 (Asnan, 2007). Akhirnya gerakan tersebut redup ketika satu persatu pemimpin gerakan menyerah hingga tahun 1961.

Memperhatikan kompleksitas masalah di pemerintahan pusat, dan adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, maka semakin membuka ruang bagi munculnya gerakan separatis yang dilandasi atas kekecewaan daerah pada pemerintah pusat. Gerakan OPM di Papua disanyalir akibat integrasi terlambatnya Papua masuk ke wilayah Indonesia, hal ini sebenarnya merupakan bentuk politik *divide et impera* yang diusahakan Belanda untuk menghambat proses integrasi wilayah Indonesia (Korwa, 2013). Isu faktor perbedaan ras antara orang Papua (Melanesoid) dengan orang Indonesia bagian barat (Austronesoid) semakin menempatkan orang Papua pada posisi resistensi untuk merdeka. Sementara itu, kemerdekaan Timor Timur di tahun 1999 telah mencabut “duri dalam daging” yang sejak tahun 1975 bersarang dalam wilayah bekas jajahan Belanda. Integrasi wilayah Timor Timur masuk sebagai bagian dari Republik Indonesia pada dasarnya adalah suatu pemaksaan kehendak, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor historis yang pada kenyataannya Timor Timur adalah bekas jajahan Portugis (Bertrand, 2012).

Di ujung utara pulau Sumatera, GAM sejak tahun 1976 menginginkan kemerdekaan dari wilayah Indonesia. Gerakan ini muncul akibat dari rasa ketidakadilan pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah, sementara Aceh pada periode revolusi telah memberi sumbangsih bagi eksistensi republik (Reid, 2012). Melalui banyak perundingan pada tahun 2005 antara GAM dan pemerintah Indonesia menemukan titik temu dengan pemberian hak sebagai daerah istimewa bagi Provinsi Aceh.

2. Konflik Antar Etnis dalam Sejarah Indonesia

Beberapa konflik horizontal pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, hal ini menurut Bertrand (2012) lebih dilatarbelakangi oleh faktor-faktor kecurigaan antar etnis, yang

menganggap etnis lain sebagai musuh Bersama. Hal demikian tercipta dalam sejarah yang kemudian dikultuskan menjadi kecurigaan-kecurigaan kolektif. Nasikun (2011) menyebutkan keadaan demikian adalah konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia periode kolonial yang majemuk dan tidak begitu terbuka.

Konflik yang terjadi antara suku Dayak dan Madura di Sampit pada 18 Februari 2001 menimbulkan bekas luka mendalam bagi kedua etnis. Peristiwa yang telah menewaskan ratusan orang tersebut menurut Suryani (2016) tergolong konflik paling masif yang terjadi di Indonesia pasca orde baru. Penyebab konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura. Tidak terima diberlakukan demikian, warga Dayak sebagai suku asli di Sampit membalas pembunuhan tersebut hingga menimbulkan bentrokan antara kedua suku tersebut. Konflik ini adalah peristiwa kelam bagi etnis Dayak dan Madura, karena hingga saat ini rekonsiliasi masih terjadi, dan akibat tragedi tersebut pandangan sebagian orang berubah dengan memosisikan orang Dayak sebagai etnis yang beringas, suka membunuh, dan atribut lainnya yang berfokus kepada tuduhan kurang memiliki rasa prike-manusiaan. Sementara bagi orang Madura sendiri adalah trauma dan duka mendalam ketika mereka mengingat peristiwa tersebut (Patji, 2003).

Konflik antar agama melanda Indonesia pada awal reformasi, di tahun 1999. Di Ambon konflik antara umat Islam dan umat Kristen tidak terbendung hingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan besar-besaran. Kelompok umat Islam dan umat Kristen saling serang dan menunjukkan kekuatannya, hingga menewaskan ratusan orang (Boedi, 2016). Diketahui akar penyebab dari konflik ini sudah lama muncul yang kemudian meledak disaat simbol-simbol sakral keagamaan dirusak.

Sementara itu, di Jakarta pada tahun 1999 tepatnya pada bulan Mei terjadi penjarahan atas orang-orang Tionghoa. Penjarahan ini disusul penganiayaan dan pemerkosaan. Sentimen kepada etnis Tionghoa terjadi akibat kecemburuan ekonomi, faktor keyakinan, dan rasial. Hal ini sebenarnya telah muncul sejak pra kemerdekaan. Etnis

Tionghoa dianggap sebagai kelompok minoritas yang telah menguasai ekonomi Indonesia sehingga memunculkan *dislike minority*, kecemburuan tersebut menemukan momentumnya ketika krisis moneter melanda Indonesia sejak tahun 1997, maka etnis Tionghoa dianggap sebagai dalang dari krisis tersebut. Anggapan demikian terbangun karena selama pemerintah Soeharto banyak orang Tionghoa yang mendapat posisi strategis dalam bidang ekonomi (Bertrand, 2012). Berdasarkan data yang dihimpun dari **Tim Gabungan Pencari Fakta** 13-15 Mei 1998 yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia pimpinan presiden **B. J. Habibie**, dipastikan bahwa terdapat 85 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang berlangsung dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 (www.tionghoa.info, 2015).

Kecurigaan terhadap etnis Tionghoa hingga saat ini masih melekat pada sebagian kalangan. Narasi yang terbangun selama ini telah menempatkan mereka sebagai kelompok minoritas yang tidak terlalu berperan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Padahal jika ditelusuri sebenarnya terdapat beberapa tokoh yang mewakili etnis Tionghoa dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) diantaranya Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan Tan Eng Hoa (Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, & Nannie Hudawati, 1995). Namun, keterlibatan mereka kian terpinggirkan dalam sejarah bangsa ketika orang-orang Tionghoa dicap bukan “pribumi” dan dianggap terlibat dalam peristiwa PKI tahun 1965. Hal ini semakin diperparah ketika rezim orde lama dan orde baru “memasung” eksistensi mereka dalam puluhan tahun.

Sebenarnya *founding fathers* bangsa telah meletakkan dasar-dasar persatuan di atas keberagaman etnis dan budaya. Keterwakilan etnis dan golongan pada sidang BPUPKI merupakan ekspresi rasa hayati yang tinggi dari *founding fathers* dalam memikirkan kerangka republik yang akan dibangun. Kehadiran perwakilan golongan dan etnis menjadi penting agar Indonesia yang didirikan betul-betul menjadi negara untuk semua etnis dan golongan. Melalui sidang BPUPKI sesungguhnya *founding fathers* ingin menunjukkan bahwa semangat persatuan dapat terbangun melalui dialog dan penghargaan

terhadap satu kelompok dengan kelompok lainnya. Akumulasi dari peleburan sekat-sekat identitas golongan, daerah, dan keyakinan telah melahirkan konsepsi yang kemudian menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. *Founding Fathers* dan Integrasi Bangsa

Sidney Hook (1990) menegaskan bahwa tidak semua aktor sejarah dapat menjadi pahlawan. Namun, peluang untuk menjadi pahlawan sangat besar ketika aktor sejarah mampu menghadirkan nilai-nilai substantif yang amat dibutuhkan masyarakat. Nilai-nilai tersebut termanifestasikan melalui ucapan, sikap, dan perbuatan aktor sejarah yang dapat diteladani oleh generasi berikutnya.

Dalam sejarah bangsa terdapat banyak aktor sejarah yang kemudian dikultuskan pahlawan nasional, sebagian dari mereka digelar *founding fathers*, bapak pendiri bangsa. Kehadiran mereka dalam ruang sejarah bangsa telah menggerakkan zamannya melalui perintisan hingga pendobrak kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa diantara mereka berasal dari daerah dan budaya yang berbeda, seperti Soekarno yang tumbuh dan besar dalam lingkungan masyarakat Jawa, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir hidup dalam lingkungan masyarakat Minangkabau. Namun, perbedaan tersebut pada kenyataannya tidak membatasi ruang gerak mereka untuk membangun dialog persatuan. Melalui penerimaan atas keberagaman itulah benih-benih Indonesia disemai dan dilahirkan.

Dalam ruang sejarah Minangkabau telah lahir banyak tokoh-tokoh bangsa, seperti Tan Malaka, Muhammad Yamin, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim dan lain sebagainya. Kehadiran mereka dalam pergerakan kebangsaan menunjukkan sesuatu yang unik. Walau lahir dan dibesarkan dalam budaya yang sama, ternyata beberapa diantara mereka memilih cara yang berbeda dalam petualangan memperjuangkan kemerdekaan. Konsistensi mereka pada garis ideologi telah menciptakan dinamika

intelektual dan gagasan pada periode pergerakan dan masa awal kemerdekaan.

Akumulasi dari eksistensi ideologis beberapa tokoh di atas termanifestasikan dalam ide dan perbuatan yang mereka tawarkan untuk republik pada periode awal kemerdekaan. Namun, di atas semua itu pada dasarnya mengerucut pada kesamaan cita-cita yang mereka ekspresikan melalui usaha merawat persatuan bangsa. Tiga tokoh di bawah ini adalah mereka yang mewakili kelompok dengan garis ideologi yang berbeda, pada masa pergerakan hingga kemerdekaan Indonesia. Mohammad Hatta mewakili garis ideologi nasionalis, Haji Agus Salim mewakili garis ideologi Islam, sementara Sutan Sjahrir mewakili garis ideologi sosialis.

1. Mohammad Hatta: Kemerdekaan untuk Semua

Mohammad Hatta lebih dikenal sebagai proklamator Republik Indonesia. Julukan “dwi tunggal” melekat pada Mohammad Hatta dan Soekarno yang bersama memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pada banyak hal sebenarnya Mohammad Hatta tidak sama dengan Soekarno, begitu pun sebaliknya, kedua tokoh ini sering kali berseberangan dalam ide, gagasan, dan perbuatan. Bahkan Sukarno mengakui sendiri bahwa ia dan Hatta tidak pernah berada dalam riak gelombang yang sama (Adams, 2007). Agaknya Hatta lebih tenang dan memposisikan diri pada jalan pikiran dibandingkan Soekarno yang lebih agresif dan menonjolkan diri. Hatta lebih menempatkan pada kehati-hatian bersikap, sementara Soekarno memilih manuver melalui agitasi massa yang menggerakkan emosi rakyat.

Hatta hijrah ke Belanda di usia 19 tahun, ia melanjutkan studi ekonomi di *Handels Hoogeschool*, Rotterdam. Kesempatan ini diperolehnya karena berasal dari keluarga berada Minangkabau, akan tetapi Hatta tidak semata-mata menggantungkan diri melalui dana yang diberikan oleh keluarganya, melainkan menunjukkan kualitas akademik dengan mendapatkan beasiswa. Selama di Belanda, Hatta

tidak menghabiskan waktu hanya untuk belajar di kampus, melainkan ikut serta dalam perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang ketika itu bernama *Indische Vereeniging*. Beberapa tahun tergabung di organisasi tersebut, Hatta ikut serta dalam menggantikan nama *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* yang kemudian di tahun 1925 diterjemahkan ke bahasa Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Bagi Hatta, penggunaan istilah “Indonesia” sebagai penyebutan untuk Hindia Belanda masih jarang digunakan (Kahin, 1980). *Indonesische* adalah sedikit dari perkumpulan politik yang pertama kali mendengarkan istilah tersebut untuk menamakan sebuah organisasi.

Geliat intelektual yang semakin kritis menunjukkan semakin menguatnya kesadaran akan identitas kebangsaan. Pergerakan untuk menentang kolonialisme disusun oleh pemuda-pemuda PI tersebut. Pada tahun 1923, PI dengan berani mengumumkan tiga asas baru berupa manifesto politik, yakni kemerdekaan Indonesia, *self-help*, dan perjuangan ke arah persatuan gerakan. Manifesto Politik tersebut telah dengan lantang menyuarakan kemerdekaan Indonesia, di samping gagasan nasionalisme dan persatuan (Anderson, 2017).

Setelah beberapa tahun menjadi bendahara PI, di tahun 1926-1929 Hatta diamanahkan untuk memimpin organisasi tersebut. Sebagai ketua, Hatta banyak mengikuti pertemuan organisasi internasional hingga mengikuti *Congress Against Colonial Oppression and Imperialism*, suatu kongres melawan penindasan kolonialisme dan imperialisme, di Brussels pada tanggal 10 hingga 15 Februari 1927. Kongres ini dihadiri oleh tokoh anti kolonial terkenal dari Asia dan Afrika, seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), Messali Hadj (Aljazair), Hansin Liu (Tiongkok), dan Lamine Senghor (Senegal). Pada kongres tersebut disepakati pendirian Liga Anti Imperialisme, Hatta ikut serta sebagai salah satu komite eksekutif bersama Nehru, Senghor, dan Messali Hadj.

Akibat keterlibatannya dalam liga tersebut, Hatta harus menerima konsekuensi dicap sebagai orang yang menyebarkan

propaganda menentang Pemerintah Hindia Belanda. Pada September 1927 Hatta ditangkap oleh polisi Belanda. Sebagai bentuk gugatannya, Hatta membela diri melalui pledoi yang terkenal *Indonesia Vrij* (Indonesia Merdeka) (Cribb & Kahin, 2012).

Di tahun 1932, Hatta menamatkan studinya dan kembali ke Indonesia. Menyandang gelar sebagai lulusan Belanda sebenarnya sangat mudah bagi Hatta untuk mendapatkan pekerjaan, namun ia tidak memilih jalan tersebut. Hatta melanjutkan perjuangan PI dengan mendirikan PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) Baru bersama Sutan Syahrir. Berbeda dengan PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno di tahun 1927, Hatta menempatkan politik kader sebagai misi utama organisasi, baginya keberlanjutan perjuangan organisasi sangat ditentukan oleh ketersediaan kader yang terdidik, bukan seperti PNI bentukan Soekarno yang menurutnya hanya mengandalkan agitasi massa rakyat (Hatta, 2018; Kahin, 1980). Melalui PNI baru, Hatta melakukan pendidikan politik kepada para kadernya, melalui misi lawatan ke daerah-daerah, ia mengunjungi banyak tempat dan memberikan ceramah sekaligus berdiskusi mengenai situasi politik saat itu. Menariknya, misi yang dilakukan Hatta tidak lagi memandang identitas kultural kader, ia menerima banyak anak muda dari beragam latar belakang budaya untuk ikut serta bahu membahu terlibat dalam aktivitas PNI Baru.

Pendidikan politik dalam pikiran Hatta berfokus pada membentuk karakter kader mandiri, menanamkan semangat kebangsaan, dan demokrasi politik. Melalui karakter dan kemandirian akan membentuk manusia yang kuat tanpa harus bersandar pada bantuan pihak lain, sehingga dalam hal ini, *non-kooperatif* dipilih sebagai asas PNI Baru dalam pergerakan. Mohammad Hatta juga memiliki pemikiran bahwa membangun semangat kebangsaan pada bangsa yang tidak merdeka artinya membangun manusianya, menyadarkan dan mengarahkan (Utomo, 2018).

Pola politik kader bentukan Hatta dan Syahrir mendapat tempat ketika para pemimpin seperti Soekarno, Syahrir, dan termasuk Hatta

ditangkap oleh pemerintah kolonial sekitar awal tahun 1930an. Ketika Sukarno ditangkap oleh pemerintah Belanda maka Partindo lantas tidak aktif karena tidak memiliki kader yang terdidik dan militan. Sementara itu, kader-kader PNI Baru telah siap melanjutkan perjuangan tanpa harus bergantung pada Hatta (Hatta, 2018).

Hatta dan Sjahrir ditangkap di Jakarta pada 25 Februari 1934. Berbeda dengan Soekarno yang dibuang ke Ende, Hatta dibuang ke pengasingan terburuk, tempat dimana orang-orang yang terlibat pemberontakan PKI tahun 1926-1927 dibuang, yakni Boven Digul. Hatta sepertinya sangat memahami semua konsekuensi dari jalan politik yang ia pilih. Ia betul-betul sudah siap dengan risiko yang akan diterima dari sikapnya melawan kolonialisme Belanda tersebut.

Buah pikir Hatta untuk berdirinya negara Indonesia tidak sampai pada periode pergerakan, selepas dari pembuangan di tahun 1942, ia bersama Soekarno merajut “dwi tunggal” menghadapi pendudukan Jepang. Ketika menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Hatta menempatkan gagasan mengenai Indonesia yang berlandaskan “kebangsaan” dan “kedaulatan rakyat” (Widjajadi, 2018). Pikiran Hatta yang moderat telah menjadi bingkai penghubung antar banyak golongan ketika itu. Atas ilmu pengetahuan yang didapatkannya di Belanda dan ilmu agama dalam kultur Minangkabau telah menjadikan Hatta sebagai pemikir yang nasionalis dan religius, ia hadir di antara keberagaman sekaligus sebagai simpul pemersatu semuanya.

Dalam pandangan Hatta negara Indonesia yang berdiri harus dapat mengakomodasi semua golongan tanpa terkecuali. Sikapnya tersebut dapat dilacak ketika ia hadir sebagai penengah dalam perdebatan sengit mengenai dasar negara Indonesia antara kelompok Islam, nasionalis dan non-Islam. Walau pun ia sendiri berasal dari keluarga ulama Minangkabau, namun dalam pikirannya ia menolak konsepsi negara Islam bagi Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Hatta berdialog dengan para tokoh Islam, diantaranya Kasman Singodimedjo, Ki Bagus

Hadikoesoemo, Teuku Hasan, dan K.H. Wachid Hasjim. Dalam dialog tersebut Hatta memberi keyakinan kepada tokoh-tokoh tersebut mengenai penghapusan sila pertama dalam Pancasila yang amat dipersoalkan oleh kelompok non-Islam, berupa “Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya” (Hatta, Subarjo, Maramis, Sunario, & Pringgodigdo, 1980). Negosiasi antara Hatta dan utusan kelompok Islam mendapatkan titik temu dengan diterimanya penghapusan tujuh kata tersebut. Peran Hatta dalam hal ini terlihat sangat penting, sebagai tokoh panutan Hatta meyakinkan kelompok Islam bahwa penyebutan “Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih pantas dan dipandang tepat agar persatuan bangsa tetap terjaga. Namun, disamping itu Hatta tetap memandang pentingnya nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Hatta kalimat “Ketuhanan yang Maha Esa” merepresentasikan identitas bangsa Indonesia yang berketuhanan.

Hatta juga telah menempatkan konsep demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sebagai suatu yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip demokrasi Indonesia tidak boleh seutuhnya mengadopsi demokrasi politik barat yang liberal. Namun, demokrasi Indonesia harus ditempatkan pada demokrasi ekonomi yang disemangati nilai gotong royong. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut “Bumi, air, dan kekayaan alam yang bermanfaat bagi orang banyak dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”, hal ini adalah wujud nyata dari pikiran Hatta yang memandang negara sebagai pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat (Hatta, 2014).

Setelah beberapa tahun di alam kemerdekaan hingga memasuki tahun 1950an, perbedaan pendapat antara Hatta dan Soekarno yang semakin tajam pada akhirnya mengharuskan Hatta mundur sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956. Faktor utama perbedaan pendapat terletak pada keterlibatan PKI yang semakin dominan dalam pemerintah dengan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) dan persoalan Irian Barat yang bagi Hatta tidak terlalu penting.

Menurut Cribb & Kahin (2012) sebenarnya banyak pihak yang melihat Hatta dapat menjadi tokoh utama penentang Soekarno dan Demokrasi Terpimpin. Tetapi Hatta tidak menunjukkan sikap resistensi yang terbuka kepada Soekarno, hal ini dilakukannya dalam rangka untuk menjaga integrasi bangsa yang baru berdiri ketika itu.

1. Haji Agus Salim: *The Grand Old Man*

Haji Agus Salim sebenarnya memiliki kesempatan untuk hidup mewah kalau saja ia tetap pada posisinya bekerja sebagai agen Belanda sepulang dari Mekkah. Namun, kesadarannya atas identitas begitu kuat sehingga telah mengalihkan pikirannya untuk ikut serta berjuang memercikkan semangat anti kolonial. Atas pilihannya tersebut telah membuat putra Minangkabau ini hidup di luar kebiasaan pemimpin politik lainnya. Haji Agus Salim konsisten berjuang dengan merelakan hidup bermewah-mewahan.

Lahir di Koto Gadang (*Sumatera Westkust*) pada 8 Oktober 1884 dengan nama Musyudul Haq dari seorang Jaksa Pengadilan yang terpandang, Sutan Mohamad Salim. Nama Agus Salim tersemat ketika sapaan “Gus” melekat pada dirinya disaat sekolah di *Europeesche Lagere School* (ELS), hingga menjadi Agus Salim yang berarti Agus putra dari tuan Salim. Setelah lulus ELS pada 1897, Agus Salim melanjutkan studinya ke *Hogere Burger School* (HBS) di Batavia. Dari Batavia ia mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda. Harapannya untuk melanjutkan studi tersebut ternyata tidak terkabulkan hingga akhirnya ia memutuskan untuk bekerja.

Eksistensi Haji Agus Salim dapat dilihat pada statusnya sebagai penerjemah, aktivis politik, wartawan, diplomat ulung, negarawan, alim ulama, dan intelektual. Peran tersebut dilakoninya dalam jiwa zaman (*zeitgeist*) yang sedang bergejolak di awal abad 20. Agus Salim ikut serta terlibat dalam dialektika zaman dengan menonjolkan identitas keislaman dan keindonesiaan yang dominan, pilihan tersebut telah menempatkan Agus Salim sebagai sosok *the grand old man*, penopang eksistensi republik Indonesia yang tidak tergantikan. Dalam

sejarah bangsa Indonesia, Haji Agus Salim dikenal sebagai anggota perumus Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, anggota dewan *Volksraad* dan tokoh *Serikat Islam* di masa *Pemerintah Hindia Belanda*, diplomat yang meraih pengakuan internasional pertama bagi Republik Indonesia, dan Menteri Luar Negeri era revolusi.

Salah satu keunggulan yang melekat pada diri seorang Haji Agus Salim, dan bahkan tidak dimiliki oleh *founding father* lainnya adalah kepiawaiannya berbicara dalam banyak bahasa. Haji Agus Salim menguasai beberapa bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Arab, Turki, dan Jerman. Namun, di balik itu semua menurut Willem Schermerhorn, ketua delegasi Belanda pada Perundingan Linggarjati dalam sebuah catatannya menulis “hanya satu kelemahan Agus Salim, yaitu selama hidupnya selalu melarat dan miskin” (Ma’rif, 2013). Agus Salim hingga akhir hayatnya tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, sebaliknya ia konsisten dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan pengorbanan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perjuangan Haji Agus Salim untuk eksistensi bangsa Indonesia terlihat pada perannya sebagai Menteri Luar Negeri di kabinet Syahrir. Ia adalah tokoh pembuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, terutama negara Mesir. Hubungan ini sekaligus merupakan bentuk pengakuan atas kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pemahamannya yang dalam mengenai Islam telah menempatkan Haji Agus Salim sebagai penengah dalam perumusan dasar negara.

2. Sutan Syahrir: *Politics of Value*

Syahrir adalah satu dari tujuh begawan revolusi Indonesia. Ketujuh orang tersebut adalah Soekarno, Hatta, Syahrir, Amir Sjarifoeddin, Tan Malaka, Sudirman, dan A. H. Nasution, dalam kadar yang berbeda menentukan arah dan produk revolusi. Ketujuh pemimpin tersebut dengan caranya masing-masing berkontribusi bagi jalannya revolusi. Setelah revolusi usai, mereka pun mengalami

peruntungan yang berbeda, aliansi berbeda, dan perimbangan kekuatan yang berbeda pula (Poeze, 2015).

Setelah lulus dari AMS (*Algemene Middelbare School*) tahun 1929, Syahrir melanjutkan sekolahnya ke *Universiteit van Amsterdam*, Belanda, dengan mengambil konsentrasi Hukum. Tidak lama setelah keberangkatannya itu, beberapa tokoh organisasi seperti Sukarno, Gatot Mangkupradja, dan rekan-rekannya ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda karena dinilai melakukan propaganda untuk menentang pemerintah. Keberuntungan memihak pada Syahrir, karena ia menyegerakan berangkat ke Belanda.

Selama di Belanda, Syahrir bersentuhan dengan paham sosialis yang didapatkannya melalui *Sociaal Democratische Studenten Club* bentukan Partai Sosialis Demokrat Belanda. Melalui *club* ini Syahrir untuk pertama kalinya membedah secara mendalam gagasan tokoh-tokoh politik dunia yang sedang dikagumi pada saat itu, seperti pemikiran Friedrich Engels, Otto Bauer, Karl Marx, Rosa Luxemburg, dan lainnya (Seri Buku Tempo, 2012). Mendapatkan kesempatan pendidikan di Eropa benar-benar membuat pemikiran Syahrir menjadi terbuka dengan berbagai macam gagasan serta situasi politik internasional yang sedang terjadi.

Mendapat kabar ada seorang pemuda yang berbakat dan menaruh perhatian pada keadaan Hindia Belanda, Hatta ketika itu sebagai ketua PI memanggil Syahrir untuk membantu pergerakan PI, Syahrir pun dipercaya sebagai sekretaris. Sejak itulah hubungan kedua putra asal Minangkabau tersebut terjalin, hingga menggagas terbentuknya PNI Baru di tahun 1931 dengan mengedepankan asas kaderisasi partai melalui pendidikan (Tirtoprodjo, 1996):

Pada tahun 1931, Syahrir memutuskan untuk kembali ke Indonesia, dan meninggalkan studinya, niat Syahrir adalah untuk terjun langsung dalam pergerakan bersama tokoh lainnya. Sesampai di Indonesia ia diminta memimpin PNI Baru pada kongres PNI Baru di Yogyakarta tahun 1932. Sekembali Hatta pada tahun 1933

kepemimpinan PNI Baru diserahkan kepadanya. Geliat aktivitas PNI Baru dan organisasi pergerakan lainnya ternyata mengkhawatirkan pemerintah, terutama bagi Gubernur Jenderal ketika itu Bonifacius Cornelis de Jonge. Akhirnya, pada Februari 1934, Sjahrir dan Hatta ditangkap, dan kemudian pada Desember 1934 mereka bersama tokoh lain seperti Tjipto Mangunkusumo, Iwa Kusumasumantri dibuang ke Boven Digoel, dan pada tahun 1936 dipindahkan ke Banda Neira.

Sjahrir dan Hatta menanti selama lima tahun untuk kemudian dapat bebas ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942. Setelah bebas Sjahrir dan Hatta pun bertemu dengan Soekarno. Pertemuan tersebut ternyata menempatkan mereka untuk memilih jalan berbeda dalam menghadapi Jepang. Soekarno dan Hatta memilih jalan berkolaborasi dengan Jepang, sementara Sjahrir memilih jalan perjuangan secara *underground* dengan membangun basis massa rakyat. Keputusan Soekarno dan Hatta berkolaborasi dengan Jepang seringkali menjadi perdebatan yang tidak selesai dalam sejarah bangsa Indonesia. Mengingat, pada satu sisi mereka menganggap cara demikian adalah langkah terbaik dan strategis untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tanpa harus berperang melawan Jepang. Sementara itu, bagi Tan Malaka, termasuk Sjahrir, cara demikian dinilai terlalu lemah dan berbelit. Bagi Tan Malaka musuh harus dihadapi dengan perlawanan terang-terangan (Kahin, 2013). Namun, antara Tan Malaka dan Sjahrir juga memiliki perbedaan konsepsi, agaknya Tan Malaka lebih radikal ketimbang Sjahrir (Poeze, 2015).

Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia dihadapkan dengan tantangan besar, yakni mempertahankan status kemerdekaan dari serangan militer Belanda yang kembali menancapkan kekuasaannya, serta memenangkan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia melalui jalan perundingan dan diplomasi. Di antara banyak tokoh, terdapat dua pandangan yang berbeda dalam penyelesaian tersebut. Tan Malaka menempatkan perjuangan tanpa perundingan, yang artinya

kemerdekaan harus diperoleh melalui jalan perlawanan. Sementara, bagi Syahrir dan Hatta menganggap kemerdekaan yang realistis sesungguhnya hanya bisa dicapai secara bertahap, rapi, dan elegan, bukan frontal dengan angkat senjata.

Sebagai perdana Menteri yang diangkat pada 14 November 1945, Syahrir dianggap oleh Belanda sebagai tokoh yang tidak berkolaborasi dengan Jepang, dengan demikian sikap Belanda pun melunak dan membuka ruang untuk mengadakan perundingan. Pada tahun 1946 Perundingan Linggarjati dilaksanakan, walau perundingan dirasa merugikan Indonesia, tetapi bagi Syahrir adalah pintu untuk membawa sengketa antara Belanda dan Indonesia ke sidang internasional. Terbukti pada tahun-tahun berikutnya melalui Perjanjian Renville, Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar telah melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Syahrir sebenarnya adalah perdana Menteri yang lihai dalam berdiplomasi. Kelihaihan tersebut akhirnya telah membuka mata dunia untuk memperhatikan Indonesia yang ketika itu sedang bersengketa. Perhatian pertama diberikan oleh India, hal ini berkat hubungan yang dibangun oleh Syahrir, pada 20 Agustus 1946 Indonesia memberi bantuan beras kepada India yang sedang mengalami krisis pangan. Jasa baik tersebut kemudian disambut dengan hubungan diplomatis yang harmonis hingga India membuka pintu bagi Syahrir untuk memperkenalkan Indonesia melalui Konferensi Hubungan Negara-negara Asia di New Delhi.

Perjuangan diplomasi Syahrir untuk Indonesia adalah perwujudan menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang baru lahir. Gerak *politics of value* yang ditampilkan Syahrir dalam PNI Baru dan diplomasi politik pasca kemerdekaan merepresentasikan pikirannya yang rasional. Jalan diplomasi yang dipilih merupakan jalan perjuangan dalam mengimbangi perlawanan fisik yang digerakkan oleh Jenderal Soedirman dan Tan Malaka.

D. Refleksi

Dewasa ini Indonesia sedang dihadapkan dengan krisis nasional yang bersifat multidimensional. Jika tidak diperhatikan hal ini akan menjadi faktor pemicu bagi munculnya disintegrasi bangsa. Sesungguhnya persoalan tersebut merupakan warisan strategi pecah belah Belanda yang hingga saat ini masih ter(di)wariskan oleh bangsa Indonesia. Selama menjajah Indonesia, ternyata Belanda telah membangun narasi-narasi propokatif yang ternyata telah membangun sikap kecurigaan antar kelompok masyarakat. Munculnya reaksi protes daerah berupa gerakan separatis, dan konflik horizontal yang dilatarbelakangi oleh persoalan etnisitas menjadi masalah rentan yang selalu dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Tidak berlebihan untuk mengatakan terdapat banyak persoalan di tengah masyarakat yang belum tertangani dengan baik, dari persoalan pembangunan yang belum merata di banyak daerah, kesejahteraan sosial, hingga pada persoalan hukum yang masih dipandang belum menjamin rasa keadilan. Sementara itu, usaha untuk menuju perbaikan masih dirasakan “masih jauh panggang dari api”. Keadaan demikian dapat dimaklumi mengingat Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk hingga 260 juta jiwa lebih. Dengan demikian, adalah konsekuensi logis bagi Indonesia untuk selalu menghadirkan jawaban dan solusi atas persoalan yang muncul, hingga terbangunnya harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebenarnya *founding fathers* bangsa telah meletakkan pandangan dan dasar-dasar kehidupan berbangsa yang jauh kedepan, melalui rajutan identitas yang mengakar dalam budaya Nusantara. Identitas tersebut melintasi sekat-sekat sektoral budaya, suku, dan ras. Melalui semangat “Bhineka Tunggal Ika” maka perwujudan Indonesia yang satu dalam keberagaman terbangun dalam identitas yang beragam tersebut. *Founding fathers* sesungguhnya telah memikirkan Indonesia kedepan merupakan negara yang besar, oleh sebab dalam perjuangannya mereka menghadirkan narasi-narasi besar tentang

merawat persatuan, yang berkenaan dengan semangat toleransi, bergotong royong, dan keadilan sosial.

Pada dasarnya terdapat peluang besar bagi para *founding fathers* untuk tidak bersatu dan tidak memikirkan persoalan persatuan Indonesia, mengingat perbedaan kultur yang ada di antara mereka menjadi faktor utama untuk membangun semangat etnosentris tersebut. Namun, pikiran sempit tersebut telah ditepis oleh mereka melalui ide dan gagasan besar untuk merajut persatuan bangsa. Berasal dari tempat dan budaya yang berbeda tidak membuat mereka harus berpikir dalam ruang budaya yang sempit, faktor-faktor pendidikan telah mengilhami sekaligus menyadari mereka akan pentingnya persatuan di atas keberagaman bangsa. Beberapa orang tokoh Minangkabau ikut serta dalam membangun narasi besar tersebut, diantaranya Mohammad Hatta menempatkan persatuan Indonesia untuk semua etnis dan agama, baginya kemerdekaan harus diisi melalui peran semua komponen bangsa. Syahrir melalui *politic of value* memandang persatuan bangsa adalah hal penting agar kemerdekaan sejati dapat diraih. Sementara itu, Haji Agus Salim menempatkan ruh agama sebagai kekuatan yang melandasi perjuangan menuju cita-cita kemerdekaan. Sudah sewajarnya buah pikir mereka diwariskan untuk menjawab tantangan *disruption* yang melanda Indonesia dan dunia saat ini.

Daftar Pustaka

- Adams, C. (2007). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia (Perspektif Pendidikan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Anderson, B. (2017). Revoloesi Pemuda. Dalam B. T. Wardaya (Ed.), *Membangun Republik* (hlm. 45–90). Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
- Asnan, G. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Boedi, T. S. (2016). Resolusi Konflik Agama Di Pulau Ambon. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 14(3), 51–60. <https://doi.org/10.22146/jkn.22305>
- Cipto, B. (2003). Gerakan Separatis Dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Demokrasi. *Jurnal Fakultas Hukum UII, XXVI*(47), 89137.
- Cribb, R., & Kahin, A. (2012). *Kamus Sejarah Indonesia* (G. Triwira, Penerj.). Depok: Komunitas Bambu.
- Hatta, M. (2014). *Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Segi Arsy.
- Hatta, M. (2018). *Berjuang dan Dibuang: Untuk Negeriku (Sebuah Otobiografi)*. Jakarta: Kompas.
- Hatta, M., Subarjo, A., Maramis, A. A., Sunario, & Pringgodigdo, A. G. (1980). *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara.
- Hidayat, F. (2018, Januari 23). Ini Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2018 Versi Mendagri. Diambil 29 Oktober 2019, dari Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-3829909/ini-daerah-rawan-konflik-di-pilkada-2018-versi-mendagri>
- Ikrar Nusa Bhakti, & Natalius Pigay. (2019). Menemukan Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik Papua: Supenkah? *IKRA-ITH HUMANIORA*.
- Kacung Marijan. (2019). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Kahin, G. (1980). In Memoriam: Mohammad Hatta, (1902-1980). *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, (30), 112–119.
- Kahin, G. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Tim Komunitas Bambu, Penerj.). Depok: Komunitas Bambu.
- Korwa, R. (2013). Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. *Jurnal Politico*, 2(1). Diambil dari

- Latif, Y. (2017). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Lombard, D. (2018). *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Ma'rif, A. S. (2013). Diplomat Jenaka Penopang Republik. *Majalah Tempo*, 12.
- merdeka.com. (2017, Oktober 4). Rekonsiliasi kultural Jawa-Sunda dalam peristiwa Perang Bubat. Diambil 29 Oktober 2019, dari Merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/rekonsiliasi-kultural-jawa-sunda-dalam-peristiwa-perang-bubat.html>
- Nasikun. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugraha, R. C., & Winarti, M. (2018). Kiprah Devisi Siliwangi dalam Menghadapi Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948. *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 215–226.
- Patji. (2003). Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya ke Palangkaraya (Dari Konflik ke (Re)konstruksi). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(2). Diambil dari <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/249>
- Poëze, H. (2015). Kerjasama Singkat Tan Malaka dan Sjahrir. Dalam *Tan Malaka dan Sjahrir dalam Kemelut Sejarah*. Bandung: Sega Arsy.
- Reid, A. (2012). *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Depok: Komunitas Bambu.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern* (Tim Serambi, Penerj.). Jakarta: Serambi.
- Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, & Nannie Hudawati (Ed.). (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Seri Buku Tempo. (2012). *Bapak Bangsa; Sjahrir, Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: Tempo.
- Sobandi, K. R. (2016). Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas. *Jurnal Kajian Wilayah*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.14203/jkw.v2i1.320>
- Sultan Hamengku Buwono X. (2008). *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*. Jakarta: Gramedia.
- Suryani, D. (2016). Konflik dan Resolusi Konflik: Perbandingan di Sambas dan Sampit. *Jurnal Penelitian Politik*, 16.
- Suryohadiprojo, S. (2001). Integrasi Bangsa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(2). Diambil dari <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2988>
- Suwarno. (2012). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Syamdani. (2009). *PRRI: Pemberontakan atau Bukan?* Yogyakarta: MedPress.
- Tirtoprodjo, S. (1996). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta.
- Utomo, I. N. (2018). PENDIDIKAN DALAM PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA. *Ilmu Sejarah - SI*, 3(1). Diambil dari <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/ilmu-sejarah/article/view/12061>
- Widjajadi, A. W. (2018). Perjumpaan dan Perpisahan Dwitunggal Sukarno-Hatta. Diambil 28 Oktober 2019, dari Tirto.id website: <https://tirto.id/perjumpaan-dan-perpisahan-dwitunggal-sukarno-hatta-cDYp>
- www.tionghoa.info. (2015, Mei 9). Korban Mei 1998: Mengapa Harus Perempuan Tionghoa? | Tionghoa.INFO - Tradisi dan Budaya Tionghoa. Diambil 29 Oktober 2019, dari <https://www.tionghoa.info/korban-mei-1998-mengapa-harus-perempuan-tionghoa/>
- Zuhdi, S. (2017). *Integrasi Bangsa dalam Bingkai Keindonesiaan*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.